

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan kesenian yang merupakan hasil ciptaan manusia beraneka ragam macamnya dalam bentuk seni rupa dengan berbagai macam bentuknya. Hal ini dikarenakan seni selalu mengikuti perkembangan zaman maupun budaya yang ada. Kenyataan tentang perkembangan zaman semakin cepat dapat diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seni adalah segala yang berkaitan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh unsur rasa. Seni merupakan proses dari manusia dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Seni bisa dilihat dari dalam intisari ekspresi dari kreatifitas manusia. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, bahwa masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa dikatakan bahwa seni adalah proses produk dari memilih medium.¹

Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.²

Perkembangan seni khususnya seni industri kreatif saat ini menyumbang peranan yang cukup penting bagi perekonomian suatu negara karena dengan munculnya

¹ Pius A., Partanto, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hal. 1.

² *Ibid.*,

banyak industri kreatif diharapkan bisa memperkuat perekonomian di negara tersebut. Oleh karena itu negara dengan peraturannya hadir untuk melindungi hasil intelektual dari para pelaku industri kreatif tersebut, karenanya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sangat penting.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual merupakan salah satu bentuk untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menciptakan desain baru agar mereka bisa bersaing di pasar bebas dengan aman dan nyaman tanpa adanya kekawatiran desain ditiru oleh orang lain.

Pendaftaran desain industri merupakan syarat mutlak agar suatu desain industri yang mempunyai sifat kebaruan dapat diberikan hak desain indutri dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Melalui pengajuan permohonan pendaftaran desain industri maka akan ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya desain indutri tersebut sehingga dapat menekan berkurangnya tindakan-tindakan seperti : pejiplakan, peniruan, atau pembajakan atas karya desain industri tersebut.

Dengan adanya kesadaran dari setiap pengrajin yang mendaftarkan setiap hasil karya desain industrinya maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya dari segi hukum jelas mereka akan mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang melakukan pejiplakan atau peniruan, sedangkan dari sudut ekonomi keuntungan jelas akan semakin bertambah.

Kaloka pottery merupakan seni kerajinan keramik berbahan dasar dari tanah liat lokal indonesia dengan teknik putar yang di buat dengan hati dan cinta sehingga setiap produknya memiliki soul yang berbeda beda. Kaloka pottery memiliki sebuah

galeri sederhana di daerah Lempuyangan, Yogyakarta. Di studio terdapat karyawan berjumlah 6 orang yang khusus untuk bagian finishing seperti melukis, spay, celup dan pemanggangan. Sedangkan proses pembentukan awal dilakukan oleh para pengrajin yang di perdayakan di daerah bantul Kaloka pottery memiliki berbagai macam jenis produk yaitu cangkir, mangkuk dan yang paling menarik adalah produk Koka dripper kopi.³ Fokusnya kepada kreasi cangkir dengan berbagai macam-macam warna dan gambar. Koka dripper seduh manual kopi merupakan satu-satu produk dari kaloka yang didaftarkan desainnya di ditjen HKI. Alasan utama kenapa koka di daftarkan karena koka desainnya sudah tetap dan tidak berubah. Koka dripper merupakan buah kolaborasi dari pemikiran dua orang yaitu pemilik klinik kopi dan kaloka pottery.⁴

Pengertian Desain Industri diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu; ‘suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan’.

Pengertian mengenai pendesain dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu; “seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri’. Dari pengertian seperti itu maka produk atau

³ Kika, *Pemilik Kaloka Pottery, Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2018, pukul. 10.00 Wib.

⁴ Pepeng, *Pemilik Kaloka Pottery, Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2018, pukul. 13.00 Wib.

barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

Hal terpenting dalam Desain Industri adalah penampilan luar (physical Appearance) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Kesan estetis adalah adalah suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari Desain Industri.⁶

Muhammad Djumhana menyatakan “bahwa adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya”, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujudkan secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun

⁵ Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 113.

⁶ Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, Lex Crimen Vol. VI/No. 5/Jul/2017, hal. 99.

demikian, perlindungan terhadap desain baru secara kongkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.⁷

Perlindungan desain industri secara tegas diatur dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan “bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”, sebagaimana ternyata dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memilih judul skripsi: **“Analisis Pelaksanaan Desain Koka Dropper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain indsutri (Studi Kasus Di Yogyakarta)”**.

B. Rumusuan Masalah

1. Bagaimana Proses Pendaftaran Desain Koka Dropper menurut Undang-Undang No.31 tahun 2000 di Wilayah Yogyakarta ?
2. Kendala Apa yang Dirasakan selama Proses Pendaftaran Desain Koka Dropper di Wilayah Yogyakarta ?
3. Apa Saja Keuntungan yang Diperoleh oleh Pengrajin setelah Desain Koka Dropper Mengalami Proses Pendaftaran?

⁷ Muhammad Djumhana, *Loc.Cit*, hal. 46.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pendaftaran Desain Koka Dripper Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 di Wilayah Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui Kendala yang Dirasakan Pengrajin Selama Proses Pendaftaran Desain Koka Dripper di Wilayah Yogyakarta.
3. Untuk Mengetahui Keuntungan Apa Saja yang Didapat oleh Pengrajin Koka Dripper Setelah Mengalami Proses Pendaftaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai Analisis Pelaksanaan Desain Koka Dripper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri (Studi Kasus Di Yogyakarta).

2. Manfaat praktis

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam memahami Koka Dripper Studi Kasus Di Yogyakarta.

E. Kerangka Pikiran

Koka dripper pada awal keluar yaitu berwarna coklat, lalu kedua albino, ketiga blue koka serta black koka atau koka berwarna hitam dan yang terakhir dan

seterusnya di produksi adalah black koka ini. Dan setiap pemilik koka memiliki nomer seri yang berbeda sehingga tiap2 pemilik koka pasti memiliki nomer seri yang berbeda Koka dripper dijual dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 180 ribu rupiah.

Sebelum launching koka mengalami proses pendaftaran di ditjen hki kota yogyakarta. Pemohon sebagai pemilik koka tidak mengalami hambatan yang mengulitkan pada saat proses pendafran. Pemohon hanya di suruh mengisi folmulir kemudian membayar di bank kemudian menyerahkan bukti pembayaran beserta penjelasan gambaran detail dan fungsi produk. Dan setelah proses tersebut pemohon sebagai pemilik hak atas desain koka hanya mendapatkan surat yang berisi bahwa koka tersebut sudah di daftarkan desainnya. Kendala yang dialami :

- a. Kendala yang dirasakan pemohon sebagai pemilik koka yaitu pada biaya pendaftaran desainnya yang sangat mahal untuk per produk saja di biayai dengan tarif sebesar Rp 1.800.000.
- b. Kendala kedua karena kaloka pottery berkolaborasi dengan cara memberdayakan para pengrajin setempat dimana tidak mudah untuk mendapatkan.
- c. Pemasaran

Untuk pemasaran dari produk koka tidak mengalami hambatan karena produk koka sudah terjual sekitar 1500 buat lebih dari awal pertama launching sampai

sekarang dan pelangganya bukan hanya dari Indonesia saja, turis asing yang berkunjung ke klinik kopi pun membelinya sebagai oleh-oleh yang menarik.

Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain industri itu meliputi fenomena benda buatan manusia, dalam pengertian ini desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga beserta alat-alat transport beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota. Berapapun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.⁸

Salah satu unsur dalam negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia (warga negara). Unsur ini ditempatkan yang pertama kali karena sejatinya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada komunitas negara, maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di dalam individu-individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini bisa terjadi karena di dalam kontrak sosial tersebut kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan di pihak lain adalah sejajar. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itulah

⁸ Agus Sachri, 1986, *Paradigma Desain Industri, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali, hal. 23.

diantara keduanya harus saling memberikan perlindungan, dan karena negara adalah organisasi kekuasaan dimana sifat kodrati kekuasaan itu cenderung disalahgunakan maka kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas dari negara.⁹

Perlindungan Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

Pasal 2

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 3

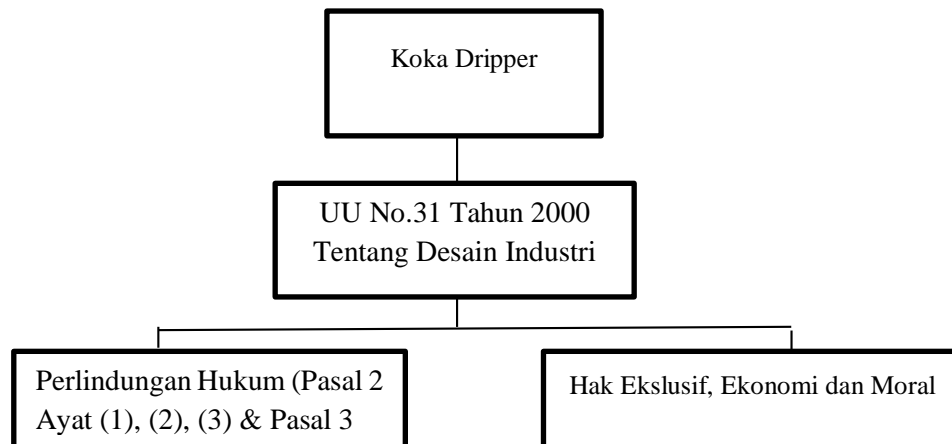
Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis membuat bagan untuk menjelaskan kerangka pikiran, yaitu:

⁹ Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 17.

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu *yuridis-empiris*, merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengenai Pelaksanaan Desain Koka Dropper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif*, yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri lalu dianalisis dengan fakta empiris yang ada yaitu Pelaksanaan Desain Koka Dropper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengrajin Koka Dropper Yogyakarta.

4. Jenis Data

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu Pelaksanaan Desain Koka Dropper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Yogyakarta.

Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun majalah yang terkait dengan Pelaksanaan Desain Koka Dropper Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pengrajin Kaloka Pottery

b. Bahan hukum sekunder

1. Yurisprudensi

2. Jurnal

3. Buku

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu *deskriptif-kualitatif* yakni, merupakan analisis yang bersifat menjelaskan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi dengan Pelaksanaa Desain Industri oleh Pengrajin Koka Dripper di Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi Tinjauan Umum Desain Industri yang terdiri dari Pengertian Desain Industri, Jenis Hak Desain Industri, Subjek Desain industri. Tinjauan Umum Perjanjian yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, Unsur Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian. Tinjauan Umum Tentang Koka Dripper dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Desain industri yang terdiri dari perlindungan secara Preventif dan Represif.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan terkait rumusan masalah yaitu Pendaftaran Desain Industri Pengrajin Koka Dripper di Wilayah Yogyakarta, Keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran Desain Industri oleh Pengrajin Koka Dripper di Wilayah Yogyakarta dan Upaya yang dapat dilakukan oleh Pengrajin Koka Dripper untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran terkait dengan hasil penelitian.